



MODUL
TEMA 14

Jalinan Organisasi Internasional bagi Kita

SEJARAH PEMINATAN PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020



MODUL
TEMA **14**

Jalinan Organisasi Internasional bagi Kita

SEJARAH PEMINATAN PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Sejarah Peminatan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII
Modul Tema 14 : Jalinan Organisasi Internasional Bagi Kita

- **Penulis:** Aminullah, S.Pd., M.Pd.; Ady Wijaya, S.Kom., M.Pd.; Drs. Muhammad Yunus
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus—Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 56 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Daftar Isi..... iv

MODUL JALINAN ORGANISASI INTERNASIONAL BAGI KITA 1

Petunjuk Penggunaan Modul..... 1

Tujuan Mempelajari Modul..... 2

Pengantar Modul..... 2

UNIT 1 SEJARAH DAN PENGARUH ORGANISASI REGIONAL 4

TERHADAP BANGSA INDONESIA..... 4

Uraian Materi..... 4

 A. SEATO 4

 B. CENTO..... 6

 C. ANZUS..... 7

 D. SAARC..... 10

 E. APEC 10

 F. Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)..... 14

 G. AFTA 19

 H. NAFTA..... 21

 I. CAFTA..... 22

 J. ASEAN (Association of South East Asian Nations) 25

 K. OKI (Organisasi Kerja Sama Islam)..... 28

 Penugasan 1..... 31

UNIT 2 SEJARAH DAN PERAN SERTA PENGARUH ORGANISASI

GLOBAL TERHADAP BANGSA INDONESIA..... 33

Uraian Materi..... 33

 A. OPEC (Organization of The Petroleum Exporting Countries) 33

 B. WTO (World Trade Organization) 35

 C. General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) 37

 D. NATO (North Atlantic Treaty Organization) 39

 E. Pakta Warsawa 40

 F. Organisasi Gerakan Non-Blok 41

 Penugasan 2..... 43

Rangkuman..... 45

Saran Referensi 47

Soal Latihan 48

Kunci Jawaban..... 52

Rubrik Penilaian..... 53

Kriteria Pindah/Lulus Modul 53

Daftar Pustaka 54

Biodata Penulis 55



JALINAN ORGANISASI INTERNASIONAL BAGI KITA

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini terdiri dari beberapa materi yang disusun secara berurutan mulai dari unit 1 s.d. unit 3. Pembahasan setiap unit merupakan satu kesatuan untuk dapat memahami modul secara baik. Anda perlu mengikuti petunjuk berikut untuk membaca modul.

Baca pengantar modul untuk mengetahui materi modul secara utuh.

- 1. Membaca tujuan yang diharapkan setelah membaca atau mempelajari modul.
- 2. Mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
- 3. Lakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman mengenai materi modul dengan baik.
- 4. Lakukan penilaian pemahaman dengan mengisi soal-soal latihan yang disediakan di akhir modul.

5. Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya bila hasil penilaian pemahaman memiliki skor 70 atau lebih.
6. Bila ada kesulitan untuk memahami materi modul, Anda dapat meminta bantuan teman, tutor, atau orang yang Anda anggap dapat memberikan penjelasan lebih baik daripada modul kepada Anda.
7. Selamat membaca dan mempelajari modul

Tujuan Mempelajari Modul

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, secara umum Anda diharapkan memiliki:

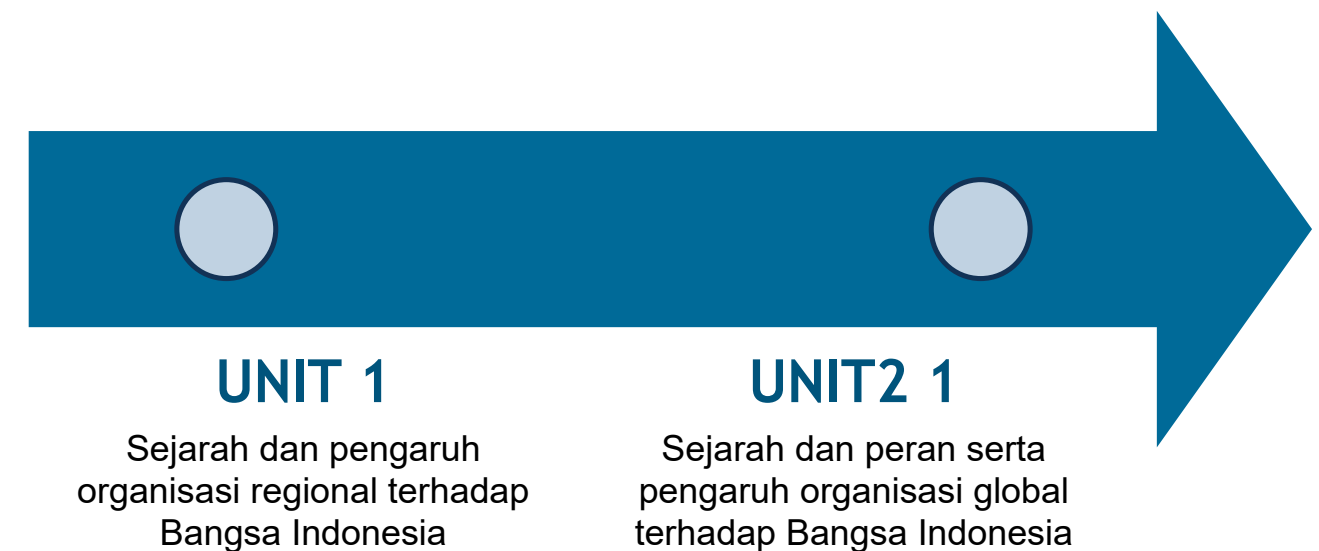
1. Pengetahuan terhadap sejarah organisasi regional dan global :NATO, SEATO, PAKTA WARSAWA, CENTO, ANZUS, SAARC, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA.
2. Pengetahuan terhadap peran organisasi regional dan global: NATO, SEATO, PAKTA WARSAWA, CENTO, ANZUS, SAARC, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA.
3. Pemahaman terhadap pengaruh organisasi regional dan global pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengantar Modul

Organisasi regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi regional mempunyai wilayah kegiatannya bersifat regional (kawasan), dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja.

Peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi regional sangat berbeda bergantung pada karakteristik organisasi tersebut. Karakteristik ini dipengaruhi oleh faktor geografis, ketersediaan sumber-sumber dan struktur organisasi. Perbedaan faktor-faktor ini akan mempengaruhi bentuk Organisasi Regional dan organ-organ yang menopangnya. Perbedaan karakter ini juga nantinya akan berpengaruh pada mekanisme dan prosedur penyelesaian konflik yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara anggota dalam sebuah Organisasi Regional.

Sedangkan organisasi Global atau Internasional adalah organisasi yang tidak terbatas pada kawasan tertentu, akan tetapi meliputi seluruh wilayah. Kerjasama bisa dalam sektor politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. organisasi global adalah organisasi yang terbentuk dari gabungan beberapa negara di dunia atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai persetujuan. misalnya seperti NATO, SEATO, GNB, OPEC, OKI.



Gambar 1. Alur isi
Modul 14, Mari Mengenal Organisasi Regional dan Global

UNIT 1

SEJARAH DAN PENGARUH ORGANISASI REGIONAL TERHADAP BANGSA INDONESIA

Uraian Materi

Yang dimaksud organisasi regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi regional mempunyai wilayah kegiatannya bersifat regional (kawasan), dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja.

Peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi regional sangat berbeda bergantung pada karakteristik organisasi tersebut. Karakteristik ini dipengaruhi oleh faktor geografis, ketersediaan sumber-sumber dan struktur organisasi. Perbedaan faktor-faktor ini akan mempengaruhi bentuk Organisasi Regional dan organ-organ yang menopangnya. Perbedaan karakter ini juga nantinya akan berpengaruh pada mekanisme dan prosedur penyelesaian konflik yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara anggota dalam sebuah Organisasi Regional.

A. SEATO

Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) adalah sebuah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954. Lembaga formal didirikan SEATO pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada Februari 1955. Hal itu terutama dibuat untuk memblokir perkembangan lebih lanjut komunis di Asia Tenggara. Markas organisasi terletak di Bangkok, Thailand. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977.

Sejak tahun 1950-an, Politik bebas aktif Indonesia bukan sikap melawan AS, tetapi oleh AS dinilai kurang tegas dalam memihak blok Barat melawan blok komunis. AS membentuk Organisasi Pakta Pertahanan Asia Tenggara (Southeast Asia Treaty Organization atau



Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Pakta_Pertahanan_Asia_Tenggara

SEATO) untuk menghimpun kekuatan Asia Tenggara di bawah pimpinan AS dan Inggris untuk melawan blok komunis, tetapi Indonesia tidak ikut serta di dalamnya. Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila tidak setuju dengan paham komunis dan akan selalu menjaga agar paham komunis tidak menguasai Indonesia. Akan tetapi Indonesia tidak mau memihak Blok Barat karena

mempunyai sikap politik bebas aktif. Demikian pula sekarang, Indonesia melawan terorisme dari mana pun datangnya, tetapi tidak berarti Indonesia harus dalam segala hal memihak AS. Sikap demikian ini tidak dikehendaki AS sejak dulu.

Yang menjadi anggota SEATO adalah Australia, Bangladesh (as East Pakistan) Bangladesh (sebagai Pakistan Timur), Perancis, New Zealand Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, United Kingdom Kerajaan Inggris, dan United States Amerika Serikat

SEATO merupakan aliansi militer pimpinan AS didirikan tahun 1954 untuk membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tenggara. SEATO merupakan keseimbangan tradisional dari pendekatan kekuasaan via aliansi eksternal untuk keamanan regional. Sejak Malaysia dan Singapura dikolonisasi oleh Inggris, mereka bukan lagi anggota SEATO. Indonesia juga menolak masuk sebagai anggota SEATO. Negara-negara baru ini memiliki pandangan bahwa masalah regional semestinya diselesaikan oleh badan lokal.

Pembentukan SEATO merupakan tanggapan terhadap permintaan bahwa daerah Asia Tenggara dilindungi terhadap ekspansionisme komunis, terutama karena diwujudkan melalui agresi militer di Korea dan Indocina dan melalui subversi didukung oleh pasukan bersenjata yang terorganisir di Malaysia dan Filipina. Vietnam, Kamboja, dan Laos (negara penerus dari Indocina) tidak dipertimbangkan untuk keanggotaan dalam SEATO untuk alasan yang berhubungan dengan perjanjian Jenewa tahun 1954 di Vietnam. Negara-negara yang bagaimanapun, diberikan perlindungan militer oleh protokol. Negara-negara lain dari Asia Selatan dan Tenggara lebih suka mempertahankan mereka kebijakan luar negeri dari non alignment. Perjanjian itu ditetapkan tujuan sebagai ketentuan hanya dan termasuk defensif untuk membantu diri sendiri dan saling membantu dalam mencegah dan melawan kegiatan subversif dari luar dan kerjasama dalam mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial.



Para pemimpin beberapa negara SEATO di Gedung Kongres di Manila, 24 Oktober 1966.
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:CongressBuilding_SEATO.jpg

SEATO tidak memiliki kekuatan berdiri tetapi mengandalkan kekuatan mencolok mobile dari negara-negara anggotanya, yang terlibat dalam latihan militer gaungan.

Pada 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan setelah terjadinya perubahan besar di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang terkait dengan kekalahan Amerika dalam Perang Vietnam.

B. CENTO

CENTO adalah sebuah pakta pertahanan yang terbentuk pada masa perang dingin, tepatnya pada tahun 1955. Pada awal berdirinya, CENTO bernama Pakta Baghdad karena didirikan di Baghdad, Irak. Pada awal berdirinya CENTO, organisasi ini beranggotakan beberapa negara yaitu, Inggris, Turki, Irak, Iran dan Pakistan. Organisasi ini juga memiliki negara yang bertindak sebagai pengawas dalam organisasi, negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat.

Pembentukan CENTO tidak terlepas dari keadaan sistem internasional yang bipolar pada saat itu. Ada dua polar utama dalam sistem internasional, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua polar utama tersebut saling berebut pengaruh, keduanya berusaha mempengaruhi negara-negara lain untuk mau bergabung dan bekerja sama dengan mereka. Kedua polar ini bisa dibilang saling bertentangan, Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat adalah negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi liberal sedangkan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet adalah negara-negara yang menganut sistem komunis sosialis. Kedua blok ini berusaha mencari pengikut sebanyak-banyaknya dengan menyebarkan ideologi yang mereka terapkan.

Regional Timur Tengah tidak luput dari ajang perebutan pengaruh tersebut. Di region ini, Amerika Serikat bergerak lebih cepat daripada Uni Soviet. Untuk mencegah penyebaran ideologi komunisme Amerika Serikat berniat membentuk sebuah pakta pertahanan di kawasan Timur Tengah. Ide pembentukan ini mulai muncul pada awal tahun 1950-an, ketika itu ketegangan di Timur Tengah sedang meningkat akibat dari konflik Arab-Israel, hal ini membuat pembentukan pakta pertahanan menjadi terhambat karena Israel merupakan sekutu dari negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat.

Situasi ini membuat Amerika Serikat dan Inggris melakukan fokus pendekatan pada negara-negara yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet seperti Iran dan Irak.



Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/CENTO>

Pendekatan pembentukan pakta pertahanan di Timur Tengah dimulai dari negara-negara yang telah menjadi sekutu Amerika Serikat, yaitu Turki yang tergabung dalam NATO (North America Treaty Organization) dan Pakistan yang tergabung sebagai anggota paling barat dari SEATO (South East Asia Treaty Organization). Pembentukan pakta pertahanan dilakukan melalui perjanjian di Baghdad antara Irak dan Turki, lalu diikuti oleh Pakistan, Iran, dan Inggris. Amerika Serikat tidak menandatangani perjanjian dalam pakta pertahanan ini, namun tetap tergabung sebagai pengawas serta merupakan anggota dari pertemuan komite. Inggris bertindak sebagai pemimpin di dalam pakta pertahanan ini.

Setelah Irak keluar dari CENTO pada 1958, keberadaan CENTO tidak memberikan bantuan yang cukup signifikan kepada anggotanya. Pada tahun 1979 terjadi revolusi Islam Iran yang membuat hubungan Iran-Amerika Serikat memburuk, hal ini berlanjut dengan keluarnya Iran dari CENTO pada 1979. Pakistan mengikuti jejak Iran, Pakistan keluar dari CENTO pada 1979 karena CENTO tidak memberika bantuan ketika Pakistan sedang berkonflik dengan India. Situasi ini membuat CENTO resmi membubarkan diri pada tahun 1979, organisasi ini hanya bertahan selama 24 tahun.

C. ANZUS

Pada tanggal 26 Januari 1788, Inggris membentuk koloni kulit putih di Australia. Awalnya keamanan dan pertahanan dari Australia dibantu dan dijamin oleh Pemerintah Inggris. Namun, Negara induk (Inggris) yang secara strategis jauh dengan Australia menyebabkan warga Australia merasa terancam dari serangan dan ancaman dunia luar.

Awalnya, baik Australia dan Selandia Baru bekerjasama dengan Inggris sejak tahun 1788, untuk menjaga keamanan dan pertahanan negaranya. Namun, ketika Perang Dunia II berlangsung, Inggris kurang memperhatikan kawasan Pasifik Selatan ditambah pula dengan kekalahan Inggris pada Perang Dunia II. Di mana pasukan Inggris tidak mampu melawan Jepang, jatuhnya Malaya dan benteng pertahanan Inggris di Singapura dan pemboman atas Darwin oleh tentara Jepang.



Suasana apel anggota CENTO

Sumber : <https://blog.ruangguru.com/sejarah-kelas-12-5-organisasi-militer-internasional>

Ketika perang tersebut berlangsung, Inggris tidak mampu membantu Australia menahan dan melawan serangan-serangan yang terjadi. Di lain pihak, ketika Australia membutuhkan bantuan dan pertolongan untuk melawan serangan Jepang, Amerika Serikat membantu Australia menghadapi serangan Jepang.

Bahkan pada bulan Mei 1942, armada gabungan Amerika Serikat dan Australia berhasil mengusir kekuatan Jepang dalam pertempuran Laut Karang. Dan pada bulan Juni berhasil mengalahkan Jepang dalam pertempuran di Midway. Kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II menunjukkan pentingnya peran Amerika Serikat sebagai pengawal pertahanan dan keamanan Australia dan Kawasan Asia Pasifik. Sehingga Australia dan Selandia Baru membentuk pakta pertahanan ANZUS (Australia, New Zealand and United States). Pembentukan ANZUS ini bisa pula dikatakan sebagai *strategy of denial toward United Kingdom*. [3] Sehingga kiblat Australia dan Selandia Baru berubah dari *Pax Britannica* ke *Pax Americana*.



Penandatanganan perjanjian saat ANZUS terbentuk
Sumber : <https://blog.ruangguru.com/sejarah-kelas-12-5-organisasi-militer-internasional>

Latar belakang dibentuknya aliansi pertahanan ANZUS di kawasan Asia Pasifik adalah:

1. Dibentuknya aliansi pertahanan ANZUS dikarenakan ketakutan dan kekhawatiran Australia dan Selandia Baru atas ancaman dari utara. Sehingga kedua negara tersebut membutuhkan perlindungan dari negara yang lebih besar dan lebih kuat untuk melindungi keamanan mereka.
2. Inisiatif yang berasal dari Menteri Luar Negeri Australia (1949-1951) yaitu Perry C. Spender. Menurutnya, Australia harus membentuk pakta keamanan di kawasan Pasifik. Pakta keamanan ini sebagai usaha untuk membuat kondisi politik yang stabil di kawasan Asia Pasifik.
3. Dalam pandangan Spender, bahaya yang paling besar bagi Asia Pasifik adalah komunis dari China yang merupakan basis komunis di Asia. Ia mengkhawatirkan komunis ini menyebar ke Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara. Karena situasi apa pun, baik damai maupun perang, di wilayah Asia Pasifik akan turut berpengaruh terhadap keamanan wilayah Australia.

4. Inisiatif Spender ini di dukung oleh Menteri Luar Negeri New Zealand, Frederick W. Doidge.

Kemudian, rencana kerjasama pertahanan itu dibicarakan dengan John Foster Dulles sebagai Wakil Truman dalam mendiskusikan konsep awal perjanjian ANZUS. Akhirnya Pakta Pertahanan ANZUS pun disepakati dan ditandatangani oleh Perry C. Snider (Australia), C.A. Berendson (New Zealand), Dean Acheson, John Foster Dulles, Alexander Willey, John F. Sparkman (Amerika Serikat) pada bulan September 1951 di San Fransisco.

Di mana prinsip-prinsip dasar dalam Pakta ANZUS yang disepakati oleh ketiga negara anggota adalah:

1. Saling membantu dalam mencegah para agresor yang mungkin muncul di kawasan Australia, Selandia baru dan Amerika Serikat;
2. Mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik;
3. Membendung pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik terutama dari China dan Uni Soviet;
4. Meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain ke kawasan Pasifik;
5. Keterikatan dalam menghadapi segala serangan bersenjata bersama karena ancaman terhadap salah satu anggota juga merupakan ancaman bagi anggota lainnya.[4] (Poin ini merupakan poin inti dan terpenting, di mana melalui pernyataan tersebut baik Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat berkomitmen untuk membentuk sebuah aliansi pertahanan (*collective defense*).

Bentuk-bentuk perjanjian dan kerjasama yang terdapat dalam aliansi pertahanan ANZUS yaitu:

1. Kerjasama bilateral mengenai masalah pertahanan dan keamanan dalam praktek kegiatan bisnis. Di mana ketiga negara anggota dapat mengakses pendidikan, pelatihan dan teknologi militer yang dimiliki oleh satu sama lain;
2. Negara-negara anggota aliansi harus menyokong perjanjian atau pertempuran Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik. Di sini, aliansi ANZUS menjadi kunci yang penting bagi Amerika Serikat sebagai dasar jaringan persekutuan bilateral Asia Pasifik yang juga melibatkan Jepang, Korea, Thailand dan Filipina. Jaringan persekutuan dan hubungan yang strategis ini merupakan inti sikap Amerika Serikat di Asia. Dengan demikian, Amerika Serikat dapat mengontrol stabilitas keamanan regional di kawasan Asia Pasifik khususnya. Dalam pakta tersebut pun, terdapat kesepakatan bahwa negara-negara anggota akan saling mendukung kapan pun dibutuhkan.

D. SAARC



Sumber : <http://www.assignmentpoint.com/wp-content/uploads/2017/01/South-Asian-Association-of-Regional-Cooperation.jpg>

South Asian Association for Regional Cooperation, atau SAARC, adalah sebuah asosiasi negara-negara Asia Selatan yang terdiri dari 8 negara diusulkan oleh Ziaur Rahman, Presiden Bangladesh saat itu, dan dibentuk pada 8 Desember 1985. Negara anggotanya termasuk Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka. Negara-negara ini membentuk wilayah sebesar 5.127.500 km² dan seperlima dari penduduk dunia.

Tujuan utama didirikannya SAARC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Asia Selatan serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di wilayah Asia Selatan, memberikan kesempatan kepada semua individu untuk hidup bermartabat dan mewujudkan potensi mereka, meningkatkan dan memperkuat kemandirian kolektif di antara negara-negara Asia Selatan serta bekerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, teknis dan ilmiah

E. APEC

1. Sejarah Berdirinya APEC

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan upaya kerjasama dari 21 negara dengan tujuan bersama untuk meningkatkan perdagangan bebas di wilayah ini. Pertama kali didirikan pada tahun 1989 dengan 12 negara anggota di Canberra, Australia, APEC telah membuat langkah besar dalam memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggotanya.

Dalam dekade pertama setelah pembentukannya, perekonomian negara-negara anggota menyumbang 70% dari pertumbuhan global ekonomi. Anggotanya adalah, berdasarkan abjad, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Cina; Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Republik Filipina, Federasi Rusia, Singapura, Cina Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam

Konsep APEC awalnya disebutkan secara terbuka oleh mantan Perdana Menteri Australia, Robert Hawke, dalam pidatonya di Seoul, Korea pada bulan Januari 1989 APEC disampaikan dalam menanggapi pertumbuhan saling ketergantungan antara ekonomi Asia-Pasifik dan kebutuhan untuk membangun masyarakat yang lebih kuat. Pada tahun itu, dua belas negara Asia-Pasifik bertemu di Canberra, Australia, untuk mendirikan APEC. Anggota pendiri adalah: Australia, Brunei, Kanada, Indonesia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Amerika Serikat.

Antara tahun 1989 dan 1992, APEC melakukan pertemuan antar pejabat senior informal dan dialog tingkat menteri. Pada tahun 1993, mantan Presiden Amerika Serikat, William Clinton, mendirikan praktek Rapat tahunan Pemimpin Ekonomi APEC. Pertemuan tahunan pertama para pemimpin APEC diadakan di Blake Island, Washington, Amerika Serikat, untuk memberikan liberalisasi perdagangan dan kerjasama ekonomi lebih lanjut dorongan dan komitmen tingkat tinggi, untuk mengembangkan semangat masyarakat, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.



Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:ApecLogo-2003.png>

Diantara tahun pendiriannya 1989 sampai pertemuan tahunan pertama para pemimpin APEC pada tahun 1993, APEC menerima enam anggota baru. Pada bulan November 1991, tiga anggota disambut: China, Hong Kong, dan Taiwan. Pada November 1993, APEC menerima Meksiko dan Papua New Guinea; mereka kemudian menerima Chile sebagai anggota pada bulan November 1994 Akhirnya, pada November 1998, Peru, Rusia, dan Vietnam adalah negara terbaru untuk bergabung dengan organisasi.

APEC menetapkan "Bogor Goals", "perdagangan bebas dan terbuka dan investasi di Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk ekonomi negara maju dan 2020 untuk negara berkembang" di Bogor, Indonesia pada tahun 1994 Tujuan ini dipandu visi APEC selama dua dekade berikutnya.



Para pemimpin negara-negara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menghadiri KTT APEC di Nusa Dua, Bali (7/10)
 Sumber : <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-tuan-rumah-pertemuan-pemimpin-ekonomi-asec-ke-21/1764349.html>

Pada tahun 1995, APEC membentuk badan penasehat bisnis, yang disebut APEC Business Advisory Council (ABAC), yang terdiri dari tiga eksekutif bisnis dari masing-masing negara anggota

2. Tujuan APEC

APEC telah mengambil sejumlah langkah untuk meliberalisasi perdagangan regional. Sebagai contoh, pada tahun 1999 meluncurkan Perjanjian APEC Open Skies, layanan udara multilateral perjanjian liberalisasi pertama di dunia. Pada tahun 2001, Pemimpin APEC mendukung diusulkan AS “Shanghai Accord” yang menekankan pelaksanaan komitmen APEC untuk membuka pasar, reformasi struktural, dan pembangunan kapasitas. Sebagai bagian dari Accord, Pemimpin berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan standar transparansi APEC, mengurangi biaya transaksi perdagangan di kawasan Asia-Pasifik sebesar 5 persen selama 5 tahun, dan mengejar kebijakan liberalisasi perdagangan yang berkaitan dengan barang dan jasa teknologi informasi.

Pejabat senior APEC mengawal sepuluh kelompok berikut, yang mencakup bidang kerjasama ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Selain itu, APEC memiliki Komite Perdagangan dan Investasi dengan adat, standar, dan subkomite kesesuaian.

- a. Perdagangan dan Investasi Data – data yang mengembangkan konsisten dan dapat diandalkan dalam perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi.

- b. Promosi Perdagangan – mengembangkan proposal untuk perdagangan pertukaran dan informasi industri.
- c. Industri Sains dan Teknologi – memperluas arus teknologi dan jaringan mitra potensial di kawasan Asia-Pasifik.
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia – mencari cara untuk bertukar informasi antara negara-negara Asia-Pasifik dalam administrasi bisnis, pelatihan industri, dan inovasi, manajemen proyek, dan perencanaan.
- e. Kerjasama Energi – mengembangkan proyek kerjasama pemanfaatan batubara, transfer teknologi, dan eksplorasi sumber daya.
- f. Konservasi Sumberdaya Kelautan–pertukaran informasi tentang kebijakan dan aspek teknis pencemaran laut dan perencanaan wilayah pesisir.
- g. Telekomunikasi–mengkompilasi survei terhadap lingkungan telekomunikasi.
- h. Transportasi– studi dan merekomendasikan cara-cara untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan keamanan transportasi.
- i. Pariwisata – industri studi daerah ‘penting.
- j. Perikanan – studi pola perikanan untuk mengembangkan sumber daya dan inisiasi koordinasi antara anggota APEC.

Pada Rapat ke-13 APEC Leaders, negara-negara anggota datang bersama-sama untuk membuat kemajuan dalam memajukan perdagangan bebas yang adil dan menjamin keamanan di wilayah tersebut. Para pemimpin memberikan perhatian khusus pada:

- a. Memajukan negosiasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
- b. Penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlindungan dan penegakan hukum.
- c. Memerangi ancaman flu burung dan pandemi potensiallainnya.
- d. Meningkatkan keamanan untuk sumber radioaktif, penerbangan sipil, dan perdagangan.

APEC bekerja untuk membangun kebijakan anti- “proteksionis” di negara-negara anggota dengan mengurangi tarif dan menjauhi hambatan-hambatan dalam

perdagangan bebas lainnya. Dengan penyatuan sumber daya, negara-negara anggota dapat berbagi informasi, dan meningkatkan kekayaan untuk bisnis dan individu. Manfaat APEC bagi warga negara anggota dengan menciptakan lebih banyak kesempatan di tempat kerja, barang dan jasa lebih murah dan meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pasar internasional.

Ada tiga bidang utama APEC berfokus pada:

- a. Perdagangan dan Investasi Liberalisasi: Di daerah ini, APEC bekerja untuk mengurangi tarif dan menghapus hambatan lain dalam perdagangan bebas.
- b. Fasilitas Bisnis: Di daerah ini, tujuannya adalah untuk memfasilitasi interaksi bisnis antara negara-negara anggota dengan mengurangi biaya melakukan bisnis, berbagi informasi perdagangan dan meningkatkan hubungan importir dan eksportir.
- c. Kerjasama Ekonomi dan Teknik (ECOTECH): Program ini mencakup kesempatan bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan dalam perdagangan internasional.

APEC telah bertemu setiap tahun sejak tahun 1993, dan di samping tujuannya, membahas berkembang isu-isu di APEC seperti perempuan, terorisme, standar transparansi, korupsi dan pandemi yang berpotensi mempengaruhi perdagangan. Setiap tahun, satu negara anggota memainkan tuan rumah bagi pertemuan. APEC didanai oleh kontribusi tahunan yang relatif kecil dari masing-masing negara anggota, dengan total nilai sekitar \$ 3.380.000 dolar Amerika (USD) per tahun. Dana ini dibayar untuk program APEC serta Sekretariat kecil yang terletak di Singapura. Kepemimpinan di Sekretariat berputar, tergantung pada siapa yang menjadi tuan rumah pertemuan itu Direktur Tahunan Eksekutif adalah dari negara tuan rumah tahun itu, dan Wakil Direktur Eksekutif adalah dari negara tuan rumah tahun depan

F. Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)

1. Sejarah Berdirinya MEE (European Economic Community) atau Uni Eropa (European Union) dan Pengaruhnya Terhadap Bangsa Indonesia.

MEE berdiri pada tahun 1957 setelah ditandatanganinya Perjanjian Roma tanggal 25 Maret 1957. Pada awal berdirinya, MEE bercita-cita untuk menyerasikan gerak kegiatan ekonomi, pengembangan yang mantap dan seimbang, stabilitas ekonomi

yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan. Namun, keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950 Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schuman berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerja sama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian Pasaran Bersama Batu Bara dan Baja Eropa atau European Coal and Steel Community (ECSC) oleh enam negara, yaitu Prancis, Jerman Barat (Republik Federal Jerman-RFJ), Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut The Six State.



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_Eropa



Foto : Acara penandatanganan Perjanjian Roma, 1957
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa

Keberhasilan ECSC mendorong negara-negara The Six State membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina, pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henry Spaak (Menlu Belgia) sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerja sama ke semua bidang ekonomi.

Laporan Komite Spaak berisi dua rancangan yang lebih mengintegrasikan Eropa, yaitu:

- a. membentuk European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE);
- b. membentuk European Atomic Energy Community (Euratom) atau Badan Tenaga Atom Eropa.

Rancangan Spaak itu disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma dan kedua perjanjian itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1958. Dengan demikian, terdapat tiga organisasi di Eropa, yaitu ECSC, EEC (MEE), dan Euratom (EAEC). Pada konferensi di Brussel tanggal 22 Januari 1972, Inggris, Irlandia, dan Denmark bergabung dalam MEE. Pada tahun 1981 Yunani masuk menjadi anggota MEE yang kemudian disusul Spanyol dan Portugal. Dengan demikian keanggotaan MEE sebanyak 12 negara. MEE merupakan organisasi yang terpenting dari ketiga organisasi tersebut. Bukan saja karena meliputi sektor ekonomi, melainkan juga karena pelaksanaannya memerlukan pengaturan bersama yang meliputi industri, keuangan, dan perekonomian.

2. Tujuan Pembentukan Organisasi MEE

MEE menegaskan tujuannya, antara lain:

- a. integrasi Eropa dengan cara menjalin kerja sama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja;
- b. memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antarnegara anggota;
- c. menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional;
- d. meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Untuk mewujudkan tujuannya, MEE membentuk Pasar Bersama Eropa (Common Market), keseragaman tarif, dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal.

3. Struktur Organisasi MEE

Organisasi MEE memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

- a. Majelis Umum (General Assembly) atau Dewan Eropa (European Parliament)
Keanggotaan Majelis Umum MEE berjumlah 142 orang yang dipilih oleh

STRUKTUR ORGANISASI EEC

1. Majelis Umum (General Assembly) atau Dewan Eropa (European Parliament)

Keanggotaan Majelis Umum MEE berjumlah 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, serta mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE serta meminta pertanggungjawabannya.



<https://slideplayer.info/slide/13656621/84/images/8/Struktur+organisasi+eec.jpg>

parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, serta mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE serta meminta pertanggungjawabannya.

b. Dewan Menteri (The Council)

Dewan Menteri MEE mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Keanggotaannya terdiri atas Menteri Luar Negeri negara-negara anggota. Tugasnya menjamin terlaksananya kerja sama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Ketuanya dipilih secara bergilir menurut abjad negara anggota dan memegang jabatan selama enam tahun.

c. Badan Pengurus Harian atau Komisi (Commission)

Keanggotaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE terdiri atas sembilan anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan empat tahun. Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. Di samping itu komisi juga mengamati dan mengawasi

keputusan MEE, memperhatikan saran-saran baru, serta memberikan usul dan kritik kepada sidang MEE dalam segala bidang. Hasil kerjanya dilaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum (General Assembly).

d. Mahkamah Peradilan (The Court of Justice)

Keanggotaan Mahkamah Peradilan MEE sebanyak tujuh orang dengan masa jabatan enam tahun yang dipilih atas kesepakatan bersama negara anggota. Fungsinya merupakan peradilan administrasi MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antarnegara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para negara anggota. Peradilan konstitusi berfungsi untuk menyelesaikan konflik perjanjian internasional. Untuk melancarkan aktivitasnya, Masyarakat Ekonomi Eropa membentuk beberapa organisasi baru, yaitu:

- 1) Parlemen Eropa (European Parliament);
- 2) Sistem Moneter Eropa (European Monetary System);
- 3) Unit Uang Eropa (European Currency Unit);
- 4) Pasar Tunggal (Single Market).

Menurut perhitungan suara referendum Prancis yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 1992 tentang perjanjian Maastrich, menunjukkan bahwa 50,95% pemilih menyatakan setuju. Untuk mendirikan organisasi-organisasi tersebut pada tanggal 7 Februari 1992 di Maastrich, Belanda diadakan pertemuan anggota MEE. Hasil pertemuan itu dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian yang disebut The Treaty on European Union (TEU) atau Perjanjian Penyatuan Eropa yang telah ditandatangani oleh Kepala Negara/Pemerintah di Maastrich, Belanda. Referendum dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari 12 negara anggota Masyarakat Eropa, yakni Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, Luksemburg, Italia, Irlandia, Denmark, Portugal, Spanyol, dan Yunani.

4. Perubahan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) menjadi Uni Eropa (UE)

Melalui perjanjian Maastrich, ke-12 negara anggota Masyarakat Eropa dipersatukan dalam mekanisme Kesatuan Eropa, dengan pelaksanaan secara bertahap. The Treaty on European Union mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993, setelah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Mulai tahun 1999, Masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut

European Currency Unit (ECU) atau (European Union – EU). Beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan MEE harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal itu berkaitan dengan bertambahnya anggota.

Kenggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat:

- a. negara tersebut berada di kawasan Benua Eropa;
- b. negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), dan bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa. Pada tahun 2004 keanggotaan Uni Eropa berjumlah dua puluh lima negara. Sepuluh negara yang menjadi anggota baru Uni Eropa sebelumnya berada di

wilayah Eropa Timur. Negara anggota Uni Eropa yang baru itu adalah Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Republik Slovakia, dan Slovenia. Pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania juga diharapkan bergabung dengan Uni Eropa. Sementara itu, permintaan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Hal itu disebabkan Turki belum melaksanakan perubahan (reformasi) politik dan ekonomi di dalam negerinya.

G. AFTA

1. Sejarah Berdirinya AFTA dan Pengaruhnya Terhadap Bangsa Indonesia.

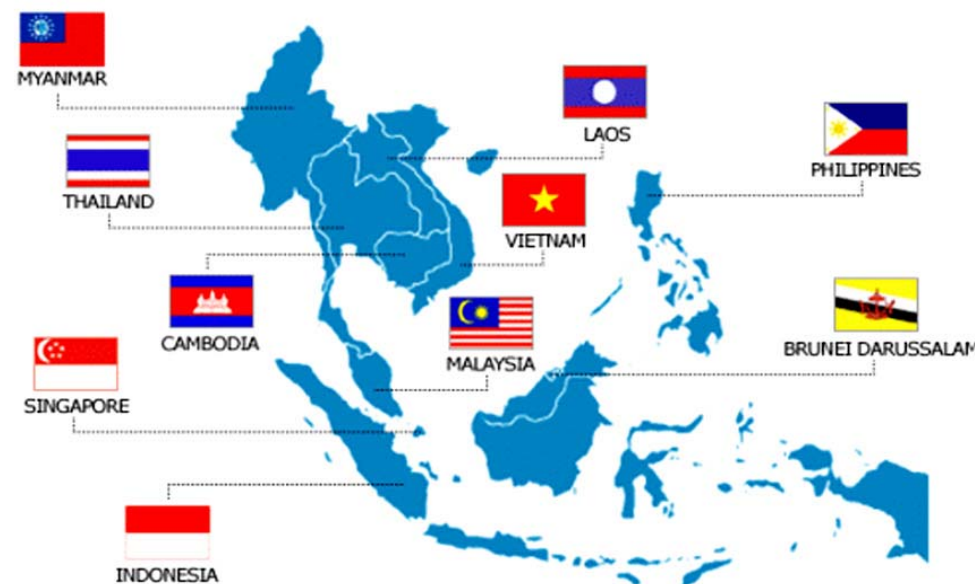


Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_Perbara

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN FreeTrade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.

1. Anggota



Sumber : <https://sastrasipilindonesia.wordpress.com/2014/01/24/seputar-afta-asean-free-trade-area-tahun-2015/>

Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enam anggota, yaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA. Sebagai contoh dari keanggotaan AFTA adalah sebagai berikut, Vietnam menjual sepatu ke Thailand, Thailand menjual radio ke Indonesia, dan Indonesia melengkapi

lingkaran tersebut dengan menjual kulit ke Vietnam. Melalui spesialisasi bidang usaha, tiap bangsa akan mengkonsumsi lebih banyak dibanding yang dapat diproduksinya sendiri.

2. Tujuan

Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Berikut adalah beberapa Manfaat dan Dampak dari AFTA:

3. Manfaat

Manfaat AFTA terhadap bangsa Indonesia adalah

- meningkatkan ekspor negara-negara ASEAN ke Indonesia.
- Menjalin kerjasama dengan Negara lain
- Memperkenalkan atau memasarkan produk Indonesia pada Negara lain

4. Dampak

Dampak AFTA terhadap bangsa Indonesia adalah

- Perdagangan bebas antara kedua negara tersebut akan membuat negara yang memiliki keunggulan komparatif (lebih efisien) dalam memproduksi barang
- Adanya AFTA telah memberikan kemudahan kepada negara-negara ASEAN untuk memasarkan produk-produk mereka di pasar ASEAN dibandingkan dengan negara-negara non-ASEAN.
- Meningkatkan volume perdagangan antarnegara ASEAN secara signifikan.
- meningkatkan ekspor negara-negara ASEAN ke Indonesia.

H. NAFTA

- Sejarah Berdirinya NAFTA dan Pengaruhnya Terhadap Bangsa Indonesia.

Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1992. Negara yang menjadi anggota NAFTA adalah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas bersama. Namun NAFTA mulai aktif pada tahun 1994.



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Perdagangan_Bebas_Amerika_Utara

2. Tujuan pembentukan NAFTA, antara lain sebagai berikut.
 - a. Mengatur impor dan produksi sesama anggota.
 - b. Meningkatkan kegiatan ekonomi di antara negara anggota.
 - c. Melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup.
 - d. Menetapkan standar produk atas barang-barang yang diperdagangkan.

I. CAFTA

1. Sejarah Berdirinya CAFTA dan Pengaruhnya Terhadap Bangsa Indonesia

Pengertian CAFTA dan Pengaruhnya pada Perekonomian Indonesia | Perjanjian Perdagangan Bebas Kawasan Tiongkok-ASEAN (*China-ASEAN Free Trade Agreement; disingkat CAFTA*) adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas di kawasan Tiongkok dan ASEAN yang kerangka kerja samanya dicetuskan di Phnom Pehn, Kamboja pada 4 November 2002 dan ditujukan bagi terbentuknya kawasan pasar bebas ASEAN dan Cina pada tahun 2010. Sebelum CAFTA ditandatangani, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah mendeklarasikan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara (*ASEAN Free Trade Agreement; disingkat AFTA*) yang beranggotakan 10 negara ASEAN.



Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/CAFTA>

Pada tahun 2010 CAFTA mulai berlaku di 6 negara yaitu Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina). Kemudian pada tahun 2015 disusul dengan bergabungnya Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam. Perjanjian bebas di Kawasan Cina-ASEAN atau CAFTA ini bertujuan untuk memperluas pasar perdagangan ke seluruh negara di kawasan ASEAN dan Cina dengan menerapkan pajak masuk yang relatif kecil.

2. Tujuan CAFTA secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. CAFTA bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN dan Cina,

- b. Meliberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi ,
- c. Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak
- d. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap kedua belah pihak.

Pelaksanaan CAFTA ternyata juga menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak dan pakar. Pihak yang mendukung persetujuan ini optimis bahwa para pelaku pasar akan mendapatkan peluang keuntungan lebih karena dapat menjual hasil produksinya ke kawasan Cina dan ASEAN tanpa takut tingginya biaya masuk ke negara tujuan. Pihak yang menentang CAFTA berpendapat bahwa perdagangan bebas di kawasan ASEAN dan Cina akan menjadi ancaman bagi para pelaku pasar dalam negeri. Mereka dikhawatirkan tidak mampu bersaing dengan para pedagang cina. Selain itu juga meningkatnya minat para pembeli terhadap produk cina karena umumnya harganya murah.



Sumber: <https://www.idsejarah.net/2018/08/cafta-china-asean-free-trade-agreement.html>

Berikut ini dampak positif diterapkannya CAFTA bagi perekonomian di Indonesia:

- a. Pemberlakuan CAFTA menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk lebih mudah memasuki pasar domestik Cina dan ASEAN. Sejumlah produk barang dan jasa diprediksi mampu bersaing dengan produk domestik di kawasan ASEAN dan Cina karena harganya yang lebih kompetitif.
- b. Menjadi motivasi bagi Indonesia untuk menciptakan produksi masyarakat yang kreatif dan kompetitif secara ekonomi.

Selain dampak positif diberlakukannya CAFTA, ternyata dikhawatirkan memiliki dampak negatif sebagai berikut:

- Meningkatnya pengangguran karena adanya PHK perusahaan untuk mengurangi beban tenaga kerja akibat berkurangnya permintaan.
- Barang dari Cina terkenal murah sehingga menurunkan penjualan hasil produksi dalam negeri. Sehingga dikhawatirkan adanya perubahan ekonomi yaitu dari pengusaha produksi menjadi penjual produk Cina. Hal ini apabila terjadi semakin luas maka akan mematikan UKM.
- Menurunnya industri manufaktur Indonesia karena kalah bersaing dengan produk Cina.



Bendera Negara-Negara CAFTA
Sumber : <https://didasadariksa.wordpress.com/2010/03/18/cafta-atau-acfta/>

Untuk menanggulangi berbagai dampak negatif pelaksanaan CAFTA tersebut maka terdapat solusi yang bisa dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan daya saing produk lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi UMKM cara meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.
- Menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang bermutu. Pendidikan Vokasi dan Sarjana harus dibekali dengan keterampilan terapan yang berguna dalam dunia kerja agar setelah lulus mereka mendapatkan lapangan kerja yang sesuai.
- Pembentukan Undang-Undang perlindungan bagi UMKM dan Produsen di Indonesia
- Membuat kebijakan untuk distributor agar tidak mendistribusikan barang impor secara berlebihan
- Mensosialisasikan cinta produk dalam negeri

J. ASEAN (Association of South East Asian Nations)

Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, lima Wakil Negara/Pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman) menindaklanjuti Deklarasi Bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan Deklarasi ASEAN (The ASEAN Declaration) atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration).



Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/ASEAN>

Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut:

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
- Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
- Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
- Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada.
- Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.



Penandatanganan Deklarasi Bangkok
Sumber : <http://www.setnas-asean.id/gallery-photos/read/penandatanganan-deklarasi-bangkok-1967>

Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) telah resmi berdiri. Pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerja sama antarnegara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang kepentingan bersama.

Pada perkembangan berikutnya, ASEAN membuat berbagai agenda yang signifikan di bidang politik seperti Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ZOPFAN) yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1976 lima negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC) yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai.

Dalam bidang ekonomi, Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA) berhasil disepakati dan ditandatangani di Manila pada 24 Februari 1977 yang menjadi landasan untuk mengadopsi berbagai instrumen dalam liberalisasi perdagangan on a preferential basis. Pada perkembangan selanjutnya, Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area berhasil disepakati di Singapura pada 28 Januari 1992. Kemajuan-kemajuan tersebut mendorong negara-negara lain di Asia Tenggara bergabung menjadi anggota ASEAN.



KTT ke-6 ASEAN di Hanoi, Vietnam

Sumber : <http://www.setnas-asean.id/gallery-photos/read/ktt-asean-ke-6-1998>

Sejalan dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai tersebut, lima negara di luar negara pemrakarsa berkeinginan menggabungkan diri dalam ASEAN, yaitu:

1. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam Sidang Khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) di Jakarta, Indonesia.
2. Vietnam resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 29-30 Juli 1995.
3. Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, 23-28 Juli 1997.
4. Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam Upacara Khusus Penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi.

Dalam perkembangan selanjutnya ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Untuk mewujudkan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yaitu, menyepakati pembentukan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community).



KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003

Sumber: <http://www.setnas-asean.id/gallery-photos/read/ktt-asean-ke-9-2003>

Melalui Bali Concord II, para Pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus melangkah maju menuju suatu Masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN itu terdiri atas tiga pilar, yaitu Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC), Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC), dan Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Ketiga pilar Masyarakat ASEAN itu terikat secara erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan dan kesejahteraan bersama yang abadi. Dalam kaitan itu, Indonesia menjadi penggagas pembentukan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya.

K. OKI (ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM)



Organisation of Islamic Cooperation

Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/OKI>

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22 - 25 September 1969, dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB, dan hak asasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI, antara lain, ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerja sama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika.

Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia.

Untuk menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, negara-negara anggota OKI memandang revitalisasi OKI sebagai permasalahan yang mendesak. Semangat dan dukungan terhadap perlunya revitalisasi OKI dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa struktur dan kinerja organisasi OKI dinilai belum efisien dan efektif. Dalam kaitan ini, telah diadakan rangkaian pertemuan yang berhasil mengkaji dan melakukan finalisasi TOR restrukturisasi OKI yang disiapkan oleh Malaysia.

Pada pertemuan tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (KTT) Ke-10 di Putrajaya, Malaysia, 11-17 Oktober 2003, OKI sepakat untuk memulai upaya konkret dalam merestrukturisasi Sekretariat OKI, terutama pada empat aspek, yaitu perampingan struktur, metodologi, peningkatan kemampuan keuangan, dan sumber daya manusia. KTT Luar Biasa OKI ke-3 di Mekkah, Arab Saudi, pada 7-8 Desember 2005 telah mengakomodasi keinginan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Macca Declaration dan OIC 10-Years Program of Actions yang meliputi restrukturisasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan Statuta OKI baru yang diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2015.

OIC 10-Years Program of Actions merupakan awal perubahan OKI yang tidak hanya menfokuskan pada masalah politik, tetapi juga ekonomi perdagangan. Program Aksi 10 Tahun OKI mencakup isu-isu politik dan intelektual, isu-isu pembangunan, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjawab kesenjangan kesejahteraan umat. Di bidang politik dan intelektual, Program Aksi 10 Tahun OKI diharapkan mampu menangani berbagai isu seperti upaya membangun nilai-nilai moderasi dan toleransi; membasmi ekstrimisme, kekerasan dan terorisme; menentang Islamofobia; meningkatkan solidaritas dan kerja sama antar negara anggota, pencegahan konflik, penanganan masalah Filipina, hak-hak kelompok minoritas dan komunitas muslim, dan masalah-masalah yang dialami Afrika.

KTT OKI Ke-11 berlangsung antara tanggal 13-14 Maret 2008 dan bertemakan "The Islamic Ummah in the 21st Century". KTT ini menghasilkan beberapa dokumen utama, yaitu Piagam OKI, Final Communiqué, dan sejumlah resolusi. Final Communiqué mengangkat berbagai isu, antara lain mengenai politik, keamanan, Palestina, minoritas muslim seperti Kosovo, terorisme, ekonomi, sosial budaya, hukum, iptek, dan sosial budaya. Sementara itu, resolusi terkait yang berhubungan dengan keamanan global/regional antara lain adalah Resolutions on the Cause of Palestine, The City of Al-Quds Al-Sharif and the Arab-Israel Conflict, Resolutions on Political Affairs, dan Resolutions on Muslim Communities

and Minorities in Non-OIC Member States. Piagam Baru tersebut pada intinya merupakan penegasan OKI untuk mengeksplorasi bentuk kerja sama yang lain dan tidak terbatas pada kerja sama politik saja.

Peran Indonesia yang menonjol lainnya dalam OKI adalah fasilitasi upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina (GRP) dengan Moro National Liberation Front (MNLF) dengan mengacu kepada Final Peace Agreement/Perjanjian Damai 1996. Peran Indonesia saat ini adalah sebagai Ketua Organization Islamic Conference Peace Committee for the Southern Philippines (PCSP-OIC). Selaku Ketua PCSP, Indonesia mengadakan tukar pandangan dengan wakil-wakil negara anggota OIC-PCPS yang memiliki perwakilan di Manila dalam upaya kolektif untuk mendorong kembali kelanjutan proses perdamaian GRP-MNLF.

Dalam berbagai forum internasional, termasuk OKI, Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Realisasi dari dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan diplomatik, yaitu pengakuan terhadap keputusan Dewan Nasional Palestina (Palestinian National Council) untuk memproklamasikan Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988. Dukungan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara Pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Di samping itu, Indonesia adalah anggota Committee on Al-Quds (Jerusalem) yang dibentuk pada tahun 1975.

Selain itu, isu terorisme juga telah menjadi perhatian utama OKI. Komitmen OKI untuk mengatasi masalah terorisme terlihat antara lain pada The Extraordinary Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers on Terrorism di Kuala Lumpur, Malaysia, 1-3 April 2002, yang menghasilkan Kuala Lumpur Declaration on International Terrorism. Deklarasi tersebut pada intinya menekankan posisi negara-negara anggota OKI dalam upaya untuk memerangi terorisme dan upaya-upaya untuk mengaitkan Islam dengan terorisme. Terorisme merupakan salah satu isu di mana OKI memiliki sikap bersama pada pembahasan di forum SMU PBB. Inti posisi OKI adalah perlunya pembedaan antara kejahatan terorisme dan hak sah perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Dalam kaitan ini, maka penyelesaian politik konflik Palestina secara adil akan memberikan sumbangan bagi pemberantasan the root causes of terrorism.

PENUGASAN 1

Anda diminta mengalisis Proses Pengaruh Organisasi Regional Terhadap Bangsa Indonesia.

■ Tujuan

Melalui penugasan ini anda diharapkan dapat :

1. Mengetahui organisasi-organisasi regional dan pengaruhnya terhadap Indonesia
2. Mengetahui tujuan keberadaan organisasi-organisasi regional

■ Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

1. Buku catatan
2. Pensil
3. Pulpen

■ Langkah-Langkah

Untuk penugasan ini, ikutilah langkah-langkah berikut:

1. Siapkan kertas HVS dan alat tulis!
2. Bacalah soal-soal dibawah, lalu tulislah jawaban dari soal-soal tersebut pada kertas HVS yang telah anda sediakan!
3. Jawablah pertanyaan dari soal-soal di bawah ini !
 - a. Bagaimanakah terbentuknya ASEAN?

.....

.....

.....

.....

b. Bagaimanakah kiprah ASEAN dalam kancah internasional?

.....
.....
.....

c. Bagaimanakah keberadaan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)?

.....
.....
.....

d. Tuliskan Negara-negara yang tergabung dalam OKI !

.....
.....
.....

■ Catatan Penting

1. Kerjakan tugas diatas sesuai dengan pengalaman dan modul yang telah dipelajari
2. Anda dapat membandingkan penugasan yang Anda kerjakan dengan hasil pekerjaan teman lainnya agar dapat saling berbagi pengalaman.
3. Agar lebih optimal dalam mengerjakan tugas, diskusikan dengan Tutor dan sesama teman lainnya.
4. Setelah mengerjakan penugasan ini Anda dapat menuliskan kesimpulan Anda sendiri mengenai unit yang sudah Anda pelajari.

■ Kesimpulan

.....
.....
.....
.....
.....
.....

UNIT 2

SEJARAH DAN PERAN SERTA PENGARUH ORGANISASI GLOBAL TERHADAP BANGSA INDONESIA

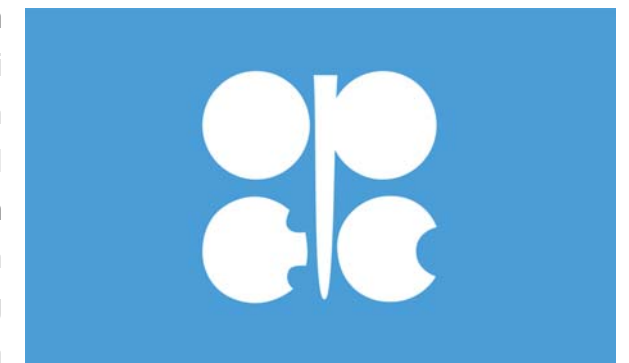


Uraian Materi

Organisasi Global atau Internasional adalah organisasi yang tidak terbatas pada kawasan tertentu, akan tetapi meliputi seluruh wilayah. Kerjasama bisa dalam sektor politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Beberapa organisasi Global dapat digambarkan sebagai berikut.

A. OPEC (Organization of The Petroleum Exporting Countries)

OPEC (Organization of The Petroleum Exporting Countries) merupakan organisasi internasional yang dibentuk akibat keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional (The Seven Sisters, yaitu Shell, British Petroleum, Texaco, Exxon, Mobil, Socal, dan Gulf) pada tahun 1959 hingga 1960 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. Akibatnya, negara-negara penghasil minyak lumpuh dan mengalami kerugian yang sangat besar.



Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/CAFTA>

Oleh karenanya, negara-negara Timur Tengah berusaha merebut pasaran minyak internasional dengan cara mengadakan perundingan pada tanggal 11-14 September 1960 di Baghdad (Irak). Akhirnya, disepakati untuk mendirikan OPEC yang anggotanya mula-mula terdiri atas Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. OPEC bertujuan agar ada keseragaman dalam pengambilan kebijaksanaan bidang perminyakan dan menentukan harga, sehingga menguntungkan negara-negara anggota atau negara produsen, sekaligus mengatur hubungan dengan perusahaan minyak asing, seperti Shell (Inggris) dan Caltex (Amerika Serikat). OPEC berupaya mewujudkan kemakmuran negara-negara anggota dan mempercepat pembangunan negara-negara berkembang.

Secara lebih terperinci, OPEC bertujuan:

1. Menyeragamkan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota.
2. Memenuhi kebutuhan minyak bumi dunia.
3. Menstabilkan harga minyak dunia.
4. Menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota.
5. Tujuan politik, yaitu mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah negara-negara konsumen.

Keanggotaan OPEC bersifat terbuka bagi negara-negara penghasil minyak. Keanggotaan OPEC mencakup 14 negara, yakni Arab Saudi (1960), Iran (1960), Irak (1960), Kuwait (1960), Venezuela (1960), Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya (1962), Uni Emirat Arab (1967), Aljazair (1969), Nigeria (1971),

Ekuador (1973), Gabon (1975), serta Angola (2007). Ekuador dan Gabon kemudian keluar dari OPEC berturut-turut pada tahun 1992 dan 1994. Sementara Indonesia memutuskan mengundurkan diri di tahun 2008. Pengunduran diri dikarenakan Indonesia telah menjadi importir minyak sejak tahun 2003 dan tak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan OPEC.

Dalam perdagangan internasional, OPEC menguasai 55% minyak dunia. Oleh karena itu, OPEC memegang peranan penting terkait masalah perminyakan internasional, terutama dalam hal menaikkan dan menurunkan tingkat produksinya. OPEC juga terlibat aktif dalam usaha peningkatan perdagangan internasional serta konservasi lingkungan.

Struktur utama OPEC terdiri atas:

1. The Conference

Merupakan otoritas tertinggi dalam OPEC, terdiri dari delegasi negara-negara anggota OPEC. Delegasi minimal 1 orang dari setiap negara. Apabila delegasi berjumlah 2 orang atau lebih, maka harus ditunjuk Kepala Delegasi. The Conference dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun. Terkecuali dalam keadaan tertentu, The

Conference dapat digelar lebih sering.

2. The Board of Governors

Terdiri atas beberapa Governor yang dipilih oleh anggota OPEC. The Board of Governors bisa melakukan pertemuan yang biasa diistilahkan dengan Meeting of The Board of Governors dan harus dihadiri oleh semua Governor yang telah ditunjuk dan minimal 2/3 dari anggota OPEC.

3. The Secretariat

Berkewajiban untuk menjalankan fungsi eksekutif sesuai dengan perundang-undangan di bawah pengawasan The Board of Governors.

B. WTO (World Trade Organization)

Sejarah Berdirinya WTO dan Pengaruhnya Terhadap Bangsa Indonesia.

World Trade Organization (WTO) adalah satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, tetapi sistem yang mengatur perdagangan

dunia tersebut telah ada sejak tahun 1948 dengan pengawasan dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Badan tertinggi dalam struktur WTO disebut dengan Ministerial Conference (MC), yang merupakan pertemuan tingkat menteri perdagangan negara anggota WTO yang diadakan sekali dalam dua tahun dengan wewenang untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang dirundingkan di tingkat bawah dan menetapkan masalah-masalah yang akan dirundingkan di masa mendatang. Ministerial Conference membawahi lima badan, yaitu:

1. Council for Trade in Goods (CTG). Badan ini secara khusus menangani masalah perdagangan barang.
2. Council for Trade in Services. Badan ini secara khusus menangani jasa yang berhubungan dengan perdagangan barang.
3. Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Badan yang secara khusus menangani isu merek dagang, hak paten, dan segala bentuk kekayaan



Sumber: https://www.opec.org/opec_web/en/multimedia/352.htm



Sumber: https://www.opec.org/opec_web/en/multimedia/352.htm

intelektual lainnya yang berhubungan langsung dengan perdagangan.

4. **Dispute Settlement Body.** Badan yang bertugas untuk mengawasi penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan perdagangan. Badan ini adalah satu-satunya yang berhak untuk membentuk panel dalam menyelesaikan tugasnya.
5. **Trade Policy Review Body.** Badan yang bertugas untuk menelaah kebijakan-kebijakan yang muncul dalam kegiatan perdagangan.

Secara umum, WTO dibentuk mengingat bahwa hubungan perdagangan internasional antar negara sudah ada sejak lama, namun terkadang dalam prakteknya sering dijumpai beberapa kecurangan yang timbul. WTO dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang dilakukan agar terjadi sistem perdagangan bebas yang tertib dan adil. Ide ini semula dilaksanakan oleh General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) sebagai awal dari pembentukan International Trade Organization. Tapi, seiring dengan perubahan dan perkembangan dalam hubungan perdagangan internasional, beberapa peraturan dan prosedur perlu untuk diperbaharui. Ide untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi perdagangan multilateral kembali muncul.

Ide pembentukan badan permanen untuk pengawasan perdagangan ini muncul pertama kali di Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay. Melalui beberapa proses perundingan dan konsultasi dari draft usulan lebih 120 negara, pada pertemuan tingkat menteri di Maroko, 12 – 15 April 1994* disahkan Final Act sekaligus berdirinya WTO pada 15 April 1994. Pembentukan WTO diharapkan efektif pada 1 Januari 1995 setelah dilakukan ratifikasi oleh negara – negara lainnya. Indonesia resmi menjadi anggota WTO melalui UU No. 7 tahun 1994 tanggal 2 November 1944 tentang Ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization. Dengan menjadi anggota WTO, maka Indonesia terikat dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam perjalanannya, WTO diharapkan untuk dapat memegang prinsip-prinsipnya, yakni:

1. **Most Favored Nation**

WTO memastikan bahwa jalannya perdagangan berlandaskan asas non-diskriminasi dengan tidak memberikan kemudahan hanya kepada satu negara anggota saja, melainkan kepada seluruh negara anggota.

2. **National Treatment**

Melarang perbedaan perlakuan antara produk asing dan produk domestik.

3. **Binding Tariff**

Kesepakatan bagi suatu negara untuk tidak menaikkan tarif sewenang-wenang

terhadap produk dari negara lain sehingga menjamin stabilitas harga komoditi.

4. **Fair Competition**

WTO menjamin kesamaan perlakuan bagi negara yang melakukan perdagangan di suatu wilayah.

C. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Sejarah Berdirinya GATT dan Pengaruhnya Terhadap Bangsa Indonesia.

Ketika mulai masuk paruh kedua dari abad ke-20. Usaha-usaha untuk menegosiasi perdagangan bebas secara internasional cukup intens dilakukan, yang akhirnya usaha-usaha tersebut terbentuk dalam perumusan general agreement on tariffs and trade (GATT), yang kemudian di teruskan oleh world trade organization (WTO). Setelah perang dunia kedua di samping terbentuknya GATT, terbentuknya pula berbagai organisasi yang bersifat internasional untuk mengharmoniskan kehidupan manusia yang berkaitan dengan interaksi manusia antar negara di bidang ekonomi.



Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/GATT>

Menyebarnya paham liberalisme pasca Perang Dunia II turut memberi kebebasan luas kepada negara-negara di dunia. Sebagai dampaknya, perekonomian internasional berubah menjadi suatu bidang yang luas dan rumit. Keadaan inilah yang melatarbelakangi gagasan pendirian organisasi perekonomian IMF (International Monetary Fund). IMF kemudian membentuk suatu badan khusus yang dinamakan GATT (General Agreements on Tariffs and Trade), dengan fokus untuk menyelesaikan dan mengatur persoalan perdagangan. GATT diresmikan pada tahun 1948, sebagai bagian dari persetujuan internasional yang dilakukan di Jenewa Swiss. Pembentukan GATT nantinya diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan diskriminasi dalam perdagangan internasional akibat tidak adanya aturan mengenai perdagangan internasional. Secara umum, pembentukan GATT diharapkan untuk dapat melakukan fungsi berikut:

1. Mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara- negara anggota GATT dengan memberikan atau merumuskan ketentuan perdagangan.

2. Menyediakan forum untuk perundingan perdagangan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu (liberalisasi perdagangan).

Dalam pelaksanaannya, GATT mengalami hambatan karena fokusnya ini hanya terbatas pada distribusi barang dan tidak berfokus pada jasa yang diperdagangkan. Hal inilah yang kemudian mendorong kembali ide untuk membentuk Organisasi Perdagangan Internasional (ITO) pada Maret 1948 dalam Konferensi Perdagangan yang diadakan di Havana, Kuba. Tercatat 53 negara sudah ikut menandatangani kesepakatan yang disebut Havana Carter. Namun rencana urung dilaksanakan karena penolakan Amerika Serikat yang, melalui Kongres Amerika Serikat, menyatakan kekhawatiran bahwa wewenang negara dalam menentukan kebijakan perdagangan Amerika Serikat akan semakin berkurang. Secara sadar, dunia telah mengetahui kelemahan dari GATT, yakni:

1. Dalam mengatur hubungan perdagangan internasional, GATT hanya berfokus pada arus jual beli barang antar negara saja. tidak pada perdagangan jasa yang sama-sama termasuk aktivitas perdagangan.
2. GATT tidak dapat dijalankan secara menyeluruh karena hanya membahas suatu tujuan atau bersifat ad hoc dan berlaku pada kurun waktu tertentu.
3. Segala jenis kesepakatan dan hasil perjanjian yang dihasilkan oleh GATT tidak membutuhkan ratifikasi oleh parlemen dari negara anggota.

Ide untuk pembentukan organisasi perdagangan internasional baru mencapai titik terang ketika diadakan pertemuan di Marakesh, 5 April 1954. Pertemuan merumuskan tiga prinsip dari organisasi perdagangan kelak, yaitu:

1. Prinsip resiprositas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut.
2. Prinsip most favored nation, yakni negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu.
3. Prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain.

Pertemuan juga menyepakati perubahan GATT menjadi organisasi perdagangan internasional, yakni WTO, pada 1 Januari 1955. Rentang waktu sebelum tanggal yang ditentukan dimanfaatkan untuk menerima ratifikasi dari 150 negara yang ikut menandatangani kesepakatan di Marakesh, Maroko.

D. NATO (North Atlantic Treaty Organization)

NATO atau *North Atlantic Treaty Organization* (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) merupakan sebuah organisasi militer antara negara - negara Blok Barat. Berdirinya organisasi ini sangat berkaitan dengan munculnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Munculnya Blok Barat dan Blok Timur tidak terlepas dari adanya Perang Dunia II yang memunculkan dua kekuatan adidaya yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Keduanya memiliki ideologi yang saling bertentangan. Uni Soviet dengan ideologi komunis dan Amerika dengan ideologi liberalis. Masing masing dari kedua negara ini kemudian membuat blok besar. Negara - negara Eropa Barat bergabung dengan Blok Barat sedangkan Eropa Timur dirangkul oleh Blok Timur.



Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/CAFTA>

Blok Barat diketuai oleh Amerika Serikat bersama negara - negara Eropa Barat lain kemudian melakukan penghadangan militer pada kekuatan Blok Timur. Pada 4 April 1949, sebanyak 12 negara blok Barat berkumpul di Brussel, Belgia untuk menandatangani pembentukan persekutuan militer bernama NATO. Negara deklarator NATO diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Belanda, Luksemburg, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, dan Belgia. Bagi Blok Barat, NATO merupakan lembaga pertahanan bersama yang berarti setiap serangan yang mengarah ke anggota NATO dianggap serangan bagi seluruh negara anggota NATO.

Blok Timur sendiri dikomandani oleh Uni Soviet yang mendirikan Pakta Warsawa sebagai tandingan NATO. Namun pada kenyataannya kedua blok ini tidak pernah berperang secara langsung selama Perang Dingin. Pada perkembangannya, negara - negara lain menyusul bergabung dengan NATO. Pada Perang Dingin, Yunani, Turki, Jerman dan Spanyol bergabung ke pihak NATO. Pasca Perang Dingin lebih banyak negara - negara yang bergabung dengan NATO terutama dari bekas negara - negara Pakta Warsawa.

Indonesia tidak memiliki peranan dalam organisasi ini karena organisasi ini melingkupi area Atlantik Utara atau negara negara blok barat untuk menekan arus utama komunisme. jadi Indonesia bkn negara anggota NATO.

E. PAKTA WARSAWA

Sebagai upaya untuk menandingi pakta pertahanan Eropa Barat (NATO), Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur berhaluan komunis mendirikan aliansi pertahanan dengan nama Pakta Warsawa. Nama resmi aliansi ini sebenarnya adalah perjanjian persahabatan, kerja sama, dan bantuan bersama. Namun, aliansi ini lebih populer dengan nama Pakta Warsawa sesuai dengan tempat ditekennya kesepakatan ini pada 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia.

Pakta Warsawa beranggotakan Uni Soviet, Albania, Polandia, Romania, Hongaria, Jerman Timur, Cekoslovakia, dan Bulgaria. Perjanjian itu menyebutkan bahwa seluruh negara anggota harus membantu jika salah satu dari mereka mendapat serangan dari negara lain. Untuk itu nantinya akan dibentuk komando militer bersama di bawah pimpinan Marsekal Ivan S Konev dari Uni Soviet. Mukadimah dari perjanjian Pakta Warsawa ini menunjukkan alasan negara-negara komunis Eropa merasa perlu mendirikan sebuah aliansi militer. Didirikannya pakta ini adalah karena dipersensjatinnya kembali Jerman Barat dan masuknya negeri itu ke dalam NATO. Kondisi ini, menurut blok komunis, meningkatkan bahaya pecahnya perang baru dan mengancam keamanan negara-negara yang cinta damai.

Salah satu unjuk gigi dan operasi militer Pakta Warsawa adalah saat seluruh negara anggotanya kecuali Albania dan Romania, melakukan invasi ke Cekoslovakia pada Agustus 1968. Saat itu, dalam aksi militer yang diberi namasandi Operasi Danube itu, sekitar 250.000 tentara Pakta Warsawa menyerang Cekoslovakia. Romania dan Albania menolak berpartisipasi dan Jerman Timur yang meski sudah bersiap diperintah Uni Soviet tak melintasi perbatasan beberapa jam sebelum invasi. Akibat invasi itu, 108 warga sipil Cekoslovakia tewas dan 500 lainnya terluka.

Pada 25 Februari 1991, Pakta Warsawa resmi bubar setelah pertemuan para menlu dan menhan lima negara anggota tersisa digelar di Hongaria. Pada Desember 1991, Uni Soviet yang menjadi induk negara-negara komunis Eropa Timur serta otak Pakta Warsawa juga dinyatakan bubar. Tak lama setelah itu, negara-negara bekas Uni Soviet mendirikan sebuah organisasi keamanan kolektif bersama. Selama 20 tahun terakhir, tujuh negara Pakta Warsawa di luar Uni Soviet bergabung dengan NATO, termasuk Jerman Timur lewat reunifikasi dengan Jerman Barat serta Ceko dan Slovakia sebagai negara terpisah.



Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Pakta_Warsawa

F. ORGANISASI GERAKAN NON-BLOK

Istilah 'Non-Blok' diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dalam pidatonya di Srilanka pada tahun 1953. Inti dari pidato tersebut kemudian digunakan sebagai prinsip dasar untuk membentuk gerakan Non-Blok, yakni:

1. Saling menghormati kedaulatan.
2. Perjanjian non-agresi.
3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain.
4. Kesetaraan dan keuntungan bersama.
5. Menjaga perdamaian.

Berdirinya Gerakan Non-Blok bermula dari Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Konferensi melibatkan negara-negara netral yang tidak memiliki keberpihakan pada blok tertentu dan tidak terlibat dalam ideologi Barat-Timur. Gerakan digagas oleh lima pemimpin dunia pada masa itu, Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Ir. Soekarno (Indonesia), Gamal Abdul Nasser (Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (India), dan Kwame Nkrumah (Ghana). Berdirinya Gerakan Non-Blok (Non Allied Movement) dikukuhkan melalui sejumlah pertemuan antar kepala negara tersebut, di antaranya:

1. Ditandatanganinya Dokumen Brioni tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), yang bertujuan mempersatukan negara-negara non-blok.
2. Sidang Majelis Umum PBB yang mempertemukan kelima kepala negara tokoh Konferensi Asia Afrika.

Secara umum, pendirian Gerakan Non-Blok dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

1. Kecemasan tentang situasi dunia semasa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berebut pengaruh di dunia.
2. Keprihatinan dari negara-negara baru merdeka dan negara berkembang tentang kedaulatan wilayah masing-masing.
3. Potensi ke arah perang nuklir di dunia karena Amerika Serikat dan Uni Soviet menempatkan pangkalan militernya di tempat-tempat strategis.



Sumber : <http://catatan17september.blogspot.com/2018/01/gerakan-non-blok-gnb.html>



Sumber : <https://tragedisocialdansejarah.blogspot.com/2014/11/bentuk-bidang-organisasi-gerakan-non.html>

Di awal berdirinya, Gerakan Non-Blok hanya berjumlah 25 negara dan tanpa kepengurusan, kecuali Ketua. Jabatan Ketua sekaligus diemban oleh pimpinan negara tempat berlangsungnya konferensi. Namun, pada setiap konferensi yang dilakukan, anggota dari gerakan ini semakin bertambah. Penerimaan anggota baru hanya berdasarkan asas berikut:

1. Menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai,
2. Mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional, dan
3. Bukan anggota salah satu pakta militer Amerika atau pun Uni Soviet.

Sempat terjadi pasang surut keanggotaan di organisasi Gerakan Non-Blok. Salah satunya adalah ketika terjadi invasi Uni Soviet ke Afghanistan yang memaksa negara-negara Islam untuk mengirimkan bantuan ke Afghanistan yang, saat itu, didukung oleh Amerika Serikat.

Beberapa konflik yang menjadi perhatian bagi Gerakan Non-Blok, di antaranya:

1. Konflik Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang mengarah kepada perlombaan teknologi senjata nuklir.
2. Krisis Timur Tengah.
3. Penyelesaian masalah Perang Vietnam.
4. Pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina.
5. Perang antara Irak dengan Iran.

PENUGASAN 2

Anda diminta menganalisis Proses Pengaruh Organisasi Global Terhadap Bangsa Indonesia.

■ Tujuan

Melalui penugasan ini anda diharapkan dapat :

1. Mengetahui organisasi-organisasi Global dan pengaruhnya terhadap Indonesia
2. Mengetahui tujuan keberadaan organisasi-organisasi Global

■ Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

1. Buku catatan
2. Pensil
3. Pulpen

■ Langkah-Langkah

Untuk penugasan ini, ikutilah langkah-langkah berikut:

1. Siapkan kertas HVS dan alat tulis!
2. Bacalah soal-soal dibawah, lalu tulislah jawaban dari soal-soal tersebut pada kertas HVS yang telah anda sediakan!
3. Jawablah pertanyaan dari soal-soal di bawah ini !

- a. Bagaimanakah keberadaan OPEC (*Organization of The Petroleum Exporting Countries*)?

.....

.....

.....

.....

b. Apakah fungsi yang diharapkan dari pembentukan WTO?

.....

.....

.....

.....

c. Bagaimanakah WTO menjalankan kegiatannya?

.....

.....

.....

.....

d. Apakah peristiwa yang mendorong terbentuknya Gerakan Non-Blok?

.....

.....

.....

.....

■ Catatan Penting

Kerjakan tugas diatas sesuai dengan pengalaman dan modul yang telah dipelajari

1. Anda dapat membandingkan penugasan yang Anda kerjakan dengan hasil pekerjaan teman lainnya agar dapat saling berbagi pengalaman.
2. Agar lebih optimal dalam mengerjakan tugas, diskusikan dengan Tutor dan sesama teman lainnya.
3. Setelah mengerjakan penugasan ini Anda dapat menuliskan kesimpulan Anda sendiri mengenai unit yang sudah Anda pelajari.

■ Kesimpulan

.....

.....

.....

.....

.....

Rangkuman

1. Organisasi regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi regional mempunyai wilayah kegiatannya bersifat regional (kawasan), dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja.
2. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22 - 25 September 1969.
3. Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia.
4. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok, suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) telah resmi berdiri.
5. Pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerja sama antarnegara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang kepentingan bersama.
6. Para pemimpin ASEAN-RRT menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The Peoples Republic of China yang merupakan perjanjian payung bagi kerjasama ekonomi dan FTA ASEAN-RRT.
7. Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan India telah menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India pada bulan Oktober 2003.
8. Landasan FTA ASEAN-Australia dan Selandia Baru adalah Joint Declaration of the Leaders at the ASEAN – Australia and New Zealand Commemorative Summit yang ditandatangani pada tanggal 30 Nopember 2004 di Vientiane, Laos.
9. Uni Eropa (disingkat UE) adalah organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa.

10. Sejak 1 Juli 2013, Uni Eropa telah memiliki 28 negara anggota.
11. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah forum kerja sama antar 21 Ekonomi di lingkaran Samudera Pasifik yang berdiri tahun 1989.
12. Saat ini terdapat 21 Ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hongkong-China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
13. NAFTA (North America Free Trade Agreement) merupakan suatu bentuk organisasi kerja sama perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara yang terdiri atas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
14. Tujuan utama NAFTA adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban serta kepentingan-kepentingan negara-negara anggotanya dalam berbagai bidang.
15. Organisasi Global atau Internasional adalah organisasi yang tidak terbatas pada kawasan tertentu, akan tetapi meliputi seluruh wilayah.
16. OPEC (Organization of The Petroleum Exporting Countries) merupakan organisasi internasional yang dibentuk akibat penurunan harga minyak oleh perusahaan minyak raksasa, seperti Shell, British Petroleum, Texaco, Caltex, Exxon, Mobil, Socal, dan Gulf.
17. Keanggotaan OPEC bersifat terbuka bagi negara-negara penghasil minyak. Keanggotaan OPEC mencakup 14 negara, yakni Arab Saudi (1960), Iran (1960), Irak (1960), Kuwait (1960), Venezuela (1960), Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya (1962), Uni Emirat Arab (1967), Aljazair (1969), Nigeria (1971), Ekuador (1973), Gabon (1975), serta Angola (2007).
18. Menyebarnya paham liberalisme pasca Perang Dunia II turut memberi kebebasan luas kepada negara-negara di dunia. Sebagai dampaknya, perekonomian internasional berubah menjadi suatu bidang yang luas dan rumit. Keadaan inilah yang melatarbelakangi gagasan pendirian organisasi perekonomian IMF (International Monetary Fund).
19. Fungsi GATT memiliki kekurangan karena lebih berfokus pada area perdagangan saja.
20. Negara-negara di dunia sepakat untuk membentuk badan perdagangan internasional sebagai pengganti GATT.
21. WTO dibentuk untuk menggantikan GATT sebagai badan internasional yang mengurus hubungan perdagangan antar negara.
22. Indonesia resmi menjadi anggota WTO melalui UU No. 7 tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang Ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization.

Saran Referensi

Modul ini masih memiliki keterbatasan dalam penyajian materi maka disarankan kepada peserta didik untuk membaca :

Ade Maman Suherma, 2003, Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Penerbit : Ghalia Indonesia

https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-islam-oki

<http://setnas-asean.id/asean-free-trade-area-afta-council>

https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm

Soal Latihan

A. Petunjuk mengerjakan soal :

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal!
2. Kerjakanlah soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke soal yang lebih rumit!
3. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang atau centang!

B. Soal-soal pilihan ganda :

1. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas
 - a. Perang Dingin
 - b. Perang Korea
 - c. Pembakaran Masjid Suci Al-Aqsa
 - d. Perang Vietnam
 - e. Krisis Kuba
2. Mekanisme kerja APEC bermuara pada
 - a. Sekretaris Jenderal PBB
 - b. Sekretaris Jenderal ASEAN
 - c. Mekanisme WTO
 - d. Pemimpin IMF
 - e. Pemimpin Ekonomi
3. Tujuan utama Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah
 - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi
 - b. Memfasilitasi persaingan
 - c. Menciptakan hambatan perdagangan
 - d. Meningkatkan arus impor
 - e. Mengentaskan kemiskinan

4. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) memiliki anggota berjumlah
 - a. 17
 - b. 18
 - c. 19
 - d. 20
 - e. 21
5. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dibentuk pada tahun
 - a. 1965
 - b. 1969
 - c. 1966
 - d. 1967
 - e. 1968
6. Deklarasi ASEAN ditandatangani pada tanggal
 - a. 5 Agustus 1967
 - b. 6 Agustus 1967
 - c. 7 Agustus 1967
 - d. 8 Agustus 1967
 - e. 9 Agustus 1967
7. Perwakilan Indonesia yang membubuhkan tanda tangan pada Deklarasi Bangkok ialah
 - a. Adam Malik
 - b. Tun Abdul Razak
 - c. Narciso Ramos
 - d. S. Rajaratnam
 - e. Thanat Khoman
8. Uni Eropa didirikan berdasarkan
 - a. Perjanjian Renville
 - b. Perjanjian Maastricht
 - c. Perjanjian Saragosa
 - d. Perjanjian Tordesillas
 - e. Perjanjian Tuntang
9. Berikut yang merupakan negara anggota NAFTA adalah
 - a. Kanada
 - b. Australia
 - c. Selandia Baru
 - d. Uni Emirat Arab
 - e. Qatar

10. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Asia Selatan serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di wilayah Asia Selatan, merupakan tujuan dari
- ANZUS
 - CENTO
 - PAKTA WARSAWA
 - SAARC
 - ASEAN
11. Organisasi yang tidak terbatas pada kawasan tertentu, disebut ...
- Organisasi Global
 - Organisasi Regional
 - Organisasi Internasional
 - Organisasi Nasional
 - Semua benar
12. Organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi ...
- Apec
 - MEE
 - OPEC
 - NAFTA
 - WTO
13. Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara ...
- GATT
 - WTO
 - AFTA
 - CAFTA
 - NAFTA
14. Untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN dan Cina, merupakan tujuan dari organisasi ...
- GATT
 - WTO
 - AFTA
 - CAFTA
 - NAFTA
15. NATO terbentuk pada tanggal ...
- 8 Desember 1985
 - 14 Mei 1955
 - 26 Januari 1788
 - 7 April 1958
 - 4 April 1949

16. Pakta warsawa terbentuk pada....
- 8 Desember 1985
 - 14 Mei 1955
 - 26 Januari 1788
 - 8 September 1954
 - 16 September 1965
17. Induk organisasi dari GATT adalah
- UNESCO
 - UNHCR
 - ASEAN
 - IMF
 - WTO
18. Kondisi yang terjadi di dunia sebelum adanya GATT ialah
- Tidak adanya peraturan yang mengatur hubungan perdagangan antar negara
 - Adanya liberalisasi perdagangan
 - Perdagangan berjalan tanpa ada diskriminasi
 - Terjadi tumpang tindih kekuasaan antara IMF dan WTO
 - Belum terbentuknya badan moneter dunia (IMF)
19. Negara adidaya yang pernah menolak kehadiran organisasi perdagangan internasional adalah
- Inggris
 - Perancis
 - Jepang
 - Australia
 - Amerika Serikat
20. Pidato PM India yang menggunakan istilah 'Non-Blok' pertama sekali disampaikan di
- Indonesia
 - India
 - Ghana
 - Sri Lanka
 - Yugoslavia



Kunci Jawaban

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 1. E | 6. D | 11. A | 16. B |
| 2. C | 7. A | 12. C | 17. D |
| 3. A | 8. B | 13. B | 18. A |
| 4. E | 9. A | 14. D | 19. E |
| 5. B | 10. D | 15. E | 20. D |

RUBRIK PENUGASAN UNIT 1

Aspek yang dinilai	Skor per aspek	Skor maksimum	Nilai yang diperoleh
• Menuliskan hasil laporan dengan bahasa yang tepat dan jelas	30	100	
• Analisis tentang pengaruh organisasi regional terhadap negara Indonesia	40		
• Mencantumkan hasil kerja yang memuat waktu, tempat, peserta, dan hasil diskusi	30		
Total Skor		100	

RUBRIK PENUGASAN UNIT 2

Aspek yang dinilai	Skor per aspek	Skor maksimum	Nilai yang diperoleh
• Menuliskan hasil laporan dengan bahasa yang tepat dan jelas	30	100	
• Analisis tentang pengaruh organisasi global terhadap bangsa Indonesia	40		
• Mencantumkan hasil kerja yang memuat waktu, tempat, peserta, dan hasil diskusi	30		
Total Skor		100	



Rubrik Penilaian

1. Setiap soal yang dijawab bernilai 1 (satu)
2. Skor akhir menggunakan skala 1 s.d. 100
3. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

$$\text{Skor Akhir} = \frac{\text{Jumlah soal yang benar}}{\text{Total soal}} \times 100$$

Contoh :

Jumlah soal yang benar adalah 10, dan Total soal = 15, maka skor akhir adalah :

$$\text{Skor Akhir} = \frac{10}{15} \times 100$$

$$\text{Skor Akhir} = 66,7$$



Kriteria Pindah/Lulus Modul

1. Telah mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
2. Telah melakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman mengenai materi modul dengan baik.
3. Telah mengisi soal-soal latihan yang disediakan di akhir modul.
4. Mendapat hasil penilaian pemahaman memiliki skor 70 atau lebih.

Daftar Pustaka

- Bhakti, Ikrar Nusa dan Athiqah Nur Alami. *Evolusi Kebijakan Pertahanan Australia (1986-2005): Dari Strategi Kontinental Ke Strategi Maritim*.
- Bhakti, Ikrar Nusa. *Keamanan Kawasan Pasifik Selatan*. Makalah Dibawakan Pada Seminar "Keamanan Regional Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Respons" Oleh Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta 17 Desember 2002.
- Camilleri, J.A. *Australian Foreign Policy*. New South Wales: The Jaracanda. 1967.
- Crowly, Frank. *Modern Australian in Document 1939-1970. Vol.5. "A New Zealand Treaty"*. Australia: Wren Publishing pty.
- Darmawan, Wawan. *Aliansi Australia Dalam Anzus Treaty (1951)*.
- Global Security (_), Baghdad Pact / Central Treaty Organization, diakses melalui <http://www.globalsecurity.org/military/world/int/cento.htm> pada 4 Desember 2012'
- Irib (2012), Iran Keluar dari CENTO, diakses melalui http://indonesian.tribe.ir/iran2/-/asset_publisher/gW0i/content/id/5029669 pada 4 Desember 2012.
- Milliar, T.B.. *Australian in the Peace and War*. NSW: Macmillan Publishing Australian pty. 1991.
- Musumeci, Martino Gabriel. "World Order And Regional Security Theories: The Value Of Almost Forgotten Theoretical Legacies." IPSA/ECPR Joint Conference at the Univ. of Sao Paulo. 16-19 Feb 2011.
- Norman, Harper. *A Great and Powerful Friend: A Study of Australian American Relation Between 1900 and 1975*. Queensland: University of Queensland. 1987.
- Phillips, Dennis. *Ambivalent Allies: Myth and Reality in the Australian American Australian Relationship*. Victoria: Penguin Books Ltd. 1998.
- Ramadhani, Dyah Ayunico. *Bentuk-Bentuk Pengaturan Keamanan Regional dan Internasional : Pengaturan Tradisional Hingga Berbasis Komunitas*.
- Sitohang, Japanton. *Respon Selandia Baru Terhadap Kebijakan Pertahanan Australia*.
- Snider, Craig. *Regional Security Structures in Anastasios Valvis. NATO: From Collective Defense to Collective Security. And The Debate Goes On*. Bradford University
- Lev Daniel S,1967. *The Political Role of the Army in Indonesia*. San Fransisco:Chander Publishing Company.
- Miriam Budiardjo,1996. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlemonter dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- M. C Ricklefs,1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Mohammad Mahfud MD,2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta:Penerbit Rineka Cipta.
- Nugroho Notosusanto, 1977. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: BalaiPustaka
- Priyo Budi Santoso,1995. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Biodata Penulis

Aminullah, S.Pd.,M.Pd.

Lahir di Tabuakkang 1972. Anak ke 3 dari 5 bersaudara dari bapak H.M Malayu Irsyad Dg Salle dan Hj.B Dg Rela.Tinggal di Tabuakkang Desa Katangka Kab. Gowa, Hp. 082393694612, email: aminullahbella@yahoo.co.id.

Menamatkan SD sampai SMA di Bontonompo kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di IKIP Ujung Pandang dan selesai tahun 1998. Pada tahun 2014 memperoleh gelar Magister Pendidikan pada bidang Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Makassar.

Pada tahun 2005 di terima dan diangkat menjadi Aparat Sipil Negara dalam lingkup Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) Regional V dan memperoleh jabatan tenaga Fungsional Pamong Belajar.

Dalam karir kedinasan pernah dikirim oleh Kementerian Pendidikan RI menjadi Guru anak-anak TKI di Sabah Malaysia pada tahun 2009 sampai 2011. Disamping itu juga aktif sebagai wartawan pada beberapa majalah dan sebuah surat kabar harian di Kota Makassar sampai 2017.

Beberapa artikel yang pernah di tulis dalam jurnal ilmiah antara lain model pembelajaran berbasis ramah anak pada lingkungan PAUD, Model Pembelajaran Terpadu Tipe Jaring Laba-Laba Untuk Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak.



Ady Wijaya

Lahir di Ujungpandang 1976. Anak Pertama dari 3 bersaudara dari Bapak Drs. Idris Maudu dan Husnah Karim, BBA.Tinggal di Perumahan Taborong Permai Blok A3/3 Pallangga Kab. Gowa, Hp. 085298433276email : adix76@gmail.com

Menyelesaikan pendidikan sarjana di STMIK Dipanegara pada Tahun 2000.Pada tahun 2010 memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Makassar.



Pada tahun 2001 di terima dan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Sulawesi Selatan dan memperoleh jabatan Tenaga Fungsional Pamong Belajar.

Muhammad Yunus

lahir di Ujung Soppeng tanggal 31 Desember 1965 anak ke 4 dari 4 bersaudara dari ayah H.A. Muh.Kasim dan Ibu Hj.A.Kadde.

Tinggal di kota Makassar Jl Aroeppala BTN Minasa Minasa Upa Blok AB.13 Nomor 7 HP.081342559072 email ; muhammad.yunus425@yahoo.co.id



Tamat SD Negeri 118 Ujung Soppeng tahun 1978, Tamat SMP Negeri Cabbenge Soppeng tahun 1981 dan tamat SMA Negeri Cangadi Soppeng tahun 1984, kemudian melanjutkan pendidikan ke kota Makassar ibu kota propinsi Sulawesi Selatan tahun 1984 di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) memperoleh gelar sarjana pada bulan September tahun 1989.

Pada awal bulan Desember tahun 1989 diangkat menjadi tenaga pengajar tetap yayasaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sampai tahun 2005.

Pada tahun 2005 di terima dan diangkat menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) Regional V dan memperoleh jabatan tenaga Fungsional Pamong Belajar sampai sekarang.